



Politik Literasi di Ruang Pinggiran: Analisis Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik dalam Program Kampus Mengajar

Muhammad Novan Prasetya^{1*}, Aenal Fuad Adam², Frederikus Antonius Mana³, Eko Rachmat Saputro⁴, Syahrudin Husein Enala⁵, Umiyati Haris⁶

^{1,2,4,6} Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

^{3,5} Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Musamus Merauke, Indonesia

*Email : muhnovanprasetya@unmus.ac.id

Received: 30-04-2025

Accepted: 31-05-2025

Published: 01-06-2025

Abstract

The “Kampus Mengajar” program has emerged as a strategic governmental initiative to address disparities in elementary education, particularly in marginalized regions. However, its implementation reveals complex dynamics deeply rooted in the political economy of education. This community engagement project aimed not only to provide technical support to students and teachers in a rural primary school but also to critically examine the social, political, and policy dimensions underlying the program. Employing a participatory-reflective approach, this activity was conducted through observation, interviews, focus group discussions, and field documentation over a four-month period. Findings indicate that while there were improvements in students’ literacy skills and technical assistance for teachers, structural issues such as the shortage of permanent educators, lack of digital infrastructure, and weak community participation remain prevalent. Moreover, the presence of university students in these schools tends to reflect a privatization of the state’s responsibility for education. Nevertheless, the critical reflection process fostered among the student participants facilitated political awareness and the development of context-specific policy recommendations. This engagement highlights the importance of advancing community service models grounded in social justice and participatory public policy as pathways toward more democratic and inclusive education systems.

Keywords: *Kampus Mengajar, political economy of education, digital literacy, public policy, participatory-reflective engagement*

Abstrak

Program Kampus Mengajar telah menjadi salah satu upaya strategis pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pendidikan dasar, terutama di wilayah marginal. Namun, implementasinya menyimpan berbagai dinamika yang tidak dapat dilepaskan dari kerangka ekonomi politik pendidikan. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk tidak hanya menjalankan peran teknis dalam mendampingi siswa dan guru di sekolah dasar, tetapi juga mengkaji secara kritis dinamika sosial, politik, dan kebijakan yang melatarbelakangi program tersebut. Menggunakan pendekatan partisipatoris-reflektif, kegiatan ini dilaksanakan melalui observasi, wawancara, diskusi kelompok terfokus, dan dokumentasi lapangan selama empat bulan. Hasil menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan kemampuan literasi dan dukungan teknis terhadap guru, hambatan struktural seperti kekurangan guru tetap, keterbatasan infrastruktur digital, dan minimnya partisipasi komunitas sekolah masih menjadi persoalan utama. Di sisi lain, keterlibatan mahasiswa justru memperlihatkan gejala privatisasi tanggung jawab negara atas pendidikan. Namun, proses refleksi kritis mahasiswa memungkinkan terbangunnya kesadaran politik dan rekomendasi berbasis konteks lokal. Oleh karena itu, pengabdian ini merekomendasikan penguatan model pengabdian berbasis keadilan sosial dan kebijakan publik partisipatif sebagai jalan menuju pendidikan yang lebih demokratis dan inklusif.

Kata kunci: Kampus Mengajar, ekonomi politik pendidikan, literasi digital, kebijakan publik, pengabdian partisipatoris-reflektif

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus mendorong transformasi pendidikan melalui serangkaian kebijakan publik yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen strategis pembangunan nasional (Syahrudin et al., 2025). Salah satu program unggulan yang lahir dari semangat reformasi pendidikan tersebut adalah Kampus Mengajar, bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang digagas oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Program ini melibatkan mahasiswa untuk terjun langsung ke sekolah-sekolah dasar dan menengah di daerah-daerah yang mengalami tantangan dalam kualitas

pendidikan, dengan tujuan meningkatkan literasi, numerasi, serta mendukung penguatan kapasitas guru dan kepala sekolah (Setyawan et al., 2021). Di balik narasi partisipatif dan edukatif ini, terdapat realitas yang kompleks yang layak ditelaah melalui pendekatan multidisipliner, khususnya dari perspektif politik, kebijakan publik, literasi digital, dan ekonomi politik.

Secara konseptual, pendidikan tidak pernah netral. Ia adalah arena politik di mana berbagai kepentingan, kekuasaan, dan ideologi saling bersaing (Haris, Adam, et al., 2025). Dalam konteks itu, Kampus Mengajar dapat dipahami sebagai bagian dari strategi hegemoni negara dalam membentuk cara berpikir

generasi muda sekaligus merespons tekanan global atas pentingnya kualitas sumber daya manusia. Namun, apakah intervensi semacam ini benar-benar menjawab tantangan struktural dalam pendidikan, atau justru menjadi instrumen simbolik yang menutupi persoalan mendasar seperti ketimpangan sumber daya pendidikan, sentralisasi kebijakan, hingga kurangnya partisipasi masyarakat lokal?

Selain itu, di tengah era digital, literasi tidak lagi sekadar kemampuan membaca dan menulis, melainkan juga mencakup literasi digital yaitu kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan memanfaatkan teknologi informasi secara kritis dan produktif (Haris, Enala, et al., 2024); (Haris & Kontu, 2024). Dalam praktik Kampus Mengajar, mahasiswa sering dihadapkan pada situasi di mana sekolah-sekolah mitra belum memiliki infrastruktur digital yang memadai, guru yang belum melek teknologi, serta siswa yang memiliki akses terbatas terhadap internet. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesenjangan digital masih menjadi hambatan nyata dalam proses pendidikan, dan sering kali diabaikan dalam narasi resmi kebijakan.

Dari sisi kebijakan publik, Kampus Mengajar merupakan bentuk dari desentralisasi peran pendidikan kepada aktor non-pemerintah, dalam hal ini mahasiswa, yang mengisi kekosongan kapasitas negara dalam menyediakan tenaga pendidik berkualitas di daerah tertinggal. Namun demikian, terdapat pertanyaan krusial mengenai keberlanjutan, efektivitas, serta akuntabilitas dari model semacam

ini. Apakah keterlibatan mahasiswa sebagai agen sementara dapat memberi dampak yang berkelanjutan? Bagaimana mekanisme evaluasi dan umpan balik dari sekolah-sekolah yang terlibat? Dan sejauh mana suara dari aktor-aktor lokal seperti guru, kepala sekolah, bahkan siswa dan orang tua yang diakomodasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program?

Pendekatan ekonomi politik menawarkan lensa yang tajam untuk membaca realitas ini (Haris & Oja, 2024); (Haris, Oja, et al., 2025). Program pendidikan seperti Kampus Mengajar tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan dalam konteks relasi kuasa dan kepentingan ekonomi-politik yang lebih luas. Kita perlu mempertanyakan siapa yang paling diuntungkan dari program ini, bagaimana distribusi sumber daya pendidikan dilakukan, serta bagaimana logika neoliberal dalam pengelolaan pendidikan, yang menekankan efisiensi, partisipasi semu, dan penyerahan tanggung jawab negara kepada individu, semakin menguat. Dalam hal ini, mahasiswa sebagai agen "pengabdian" berpotensi menjadi subjek yang dikomodifikasi oleh sistem tanpa disadari.

Lebih jauh, keterlibatan mahasiswa dalam program Kampus Mengajar juga merupakan momen penting untuk melihat bagaimana bentuk pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) dimaknai dan dijalankan. Apakah pengabdian kepada masyarakat benar-benar menjadi sarana pembentukan karakter kritis dan transformatif mahasiswa? Ataukah hanya menjadi sarana pemenuhan kredit kuliah dan

pelaporan administratif? Jawaban atas pertanyaan ini sangat bergantung pada bagaimana institusi pendidikan tinggi membingkai kegiatan pengabdian, serta sejauh mana mahasiswa dilibatkan dalam refleksi kritis atas praktik yang mereka jalani di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengkritisi dan mengkaji implementasi program Kampus Mengajar dari perspektif politik literasi, kebijakan publik, dan ekonomi politik, dengan fokus pada bagaimana program ini berjalan di lapangan, bagaimana aktor-aktor lokal terlibat, serta bagaimana mahasiswa memahami peran dan posisi mereka dalam struktur sosial yang lebih luas. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong refleksi kritis mahasiswa terhadap praktik pendidikan yang mereka lakukan, serta menyusun rekomendasi kebijakan berbasis temuan lapangan yang lebih adil dan inklusif.

Urgensi kegiatan pengabdian ini terletak pada pentingnya membongkar narasi tunggal dalam kebijakan pendidikan yang cenderung normatif dan teknokratis, serta menggantinya dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan berpihak pada keadilan sosial. Melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses kajian kritis ini, diharapkan tercipta ruang dialog yang sehat antara universitas, masyarakat, dan negara dalam membangun sistem pendidikan yang demokratis, merata, dan berkelanjutan.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan

basis partisipasi aktif dalam program Kampus Mengajar, dengan lokasi penempatan di salah satu sekolah dasar negeri di wilayah pinggiran kabupaten yang tergolong sebagai wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Kegiatan ini dilakukan selama 4 bulan, dengan pembagian peran utama mahasiswa sebagai mitra pendamping guru dalam kegiatan pembelajaran, serta sebagai fasilitator literasi, numerasi, dan pengenalan teknologi digital di lingkungan sekolah.

Pelaksanaan kegiatan tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan kepada siswa, tetapi juga pada pengamatan dan refleksi kritis terhadap struktur pendidikan lokal, bentuk relasi kekuasaan dalam pengambilan keputusan di sekolah, hingga respon masyarakat terhadap kehadiran mahasiswa Kampus Mengajar. Fokus kegiatan diarahkan pada dua ranah utama: pertama, praktik pendampingan dan penguatan literasi digital di ruang kelas; dan kedua, pengumpulan data kualitatif yang menggambarkan kompleksitas relasi sosial-politik di lingkungan pendidikan lokal.

Pada tahap awal, dilakukan observasi partisipatif selama dua minggu pertama untuk memahami struktur organisasi sekolah, kebiasaan belajar siswa, gaya mengajar guru, serta ketersediaan dan pemanfaatan teknologi digital di lingkungan sekolah. Observasi ini juga mencakup interaksi informal dengan aktor lokal seperti guru, kepala sekolah, komite sekolah, serta tokoh masyarakat, guna memetakan dinamika sosial yang memengaruhi praktik pendidikan sehari-hari.

Setelah fase observasi, mahasiswa mulai melakukan intervensi kegiatan pembelajaran,

khususnya pada mata pelajaran yang berfokus pada penguatan kemampuan membaca dan berhitung, sekaligus menyisipkan elemen literasi digital. Contohnya, siswa dikenalkan pada penggunaan alat bantu pembelajaran digital sederhana seperti aplikasi interaktif berbasis Android, video pembelajaran, dan permainan edukatif. Namun keterbatasan infrastruktur, seperti ketiadaan Wi-Fi, perangkat TIK yang minim, serta daya listrik yang tidak stabil sehingga membatasi ruang gerak intervensi digital ini. Hal ini justru memperkuat temuan bahwa kesenjangan digital masih sangat nyata dan berdampak langsung pada kualitas pendidikan.



Gambar 1.1. Tahapan Intervensi Kegiatan Pembelajaran

Dalam proses ini, mahasiswa juga menyelenggarakan beberapa workshop mini untuk guru-guru

mengenai penggunaan teknologi dasar seperti PowerPoint, Google Workspace, serta strategi mengintegrasikan konten digital ke dalam kurikulum kontekstual. Respon yang diterima beragam: ada yang antusias karena merasa tertinggal dari perkembangan zaman, ada pula yang cemas karena beban administratif justru bertambah. Refleksi ini menjadi pintu masuk untuk melihat politik kurikulum, yakni bagaimana guru sebagai aktor mikro seringkali menjadi sasaran kebijakan dari atas tanpa pelibatan berarti dalam proses perumusan dan pelaksanaan.



Gambar 1.2. Tahapan Wawancara

Di luar kelas, dilakukan pula wawancara semi-struktural dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa untuk menggali persepsi mereka terhadap kehadiran mahasiswa Kampus Mengajar. Data yang diperoleh mengindikasikan bahwa program ini dianggap membantu secara teknis, namun tidak menyentuh akar persoalan seperti minimnya jumlah guru tetap, beban administrasi, hingga lemahnya infrastruktur sekolah. Temuan ini memperkuat analisis bahwa program Kampus Mengajar, meskipun bersifat solutif jangka pendek, tidak mampu menggantikan peran negara dalam memenuhi hak pendidikan secara struktural.

Metodologi yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode

partisipatoris-reflektif, yang menggabungkan kerja praksis (intervensi langsung dalam kegiatan pembelajaran) dengan proses refleksi kritis yang berkelanjutan. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, catatan lapangan, wawancara, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta dokumentasi visual (Sugiyono, 2017). Semua data dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka teori ekonomi politik pendidikan, politik literasi, dan kebijakan publik partisipatif.

Penggunaan pendekatan ekonomi politik penting untuk membaca struktur ketimpangan dalam distribusi sumber daya pendidikan, serta menyoroti bagaimana program-program seperti Kampus Mengajar menjadi bagian dari logika neoliberal dalam pengelolaan pendidikan, di mana tanggung jawab negara digeser ke aktor individu, dalam hal ini mahasiswa. Di sisi lain, pendekatan politik literasi memungkinkan penelusuran terhadap bagaimana pengetahuan diproduksi dan dikendalikan di ruang kelas, serta siapa yang mendapat akses terhadap teknologi, informasi, dan peluang belajar yang bermakna.

Kegiatan ini juga menempatkan mahasiswa bukan sekadar sebagai agen pelaksana kebijakan, melainkan sebagai subjek transformatif yang melakukan refleksi kritis terhadap perannya. Setiap akhir minggu, dilakukan sesi refleksi mingguan yang dituangkan dalam jurnal reflektif, yang tidak hanya mencatat kegiatan teknis, tetapi juga menganalisis secara mendalam dinamika kekuasaan, hambatan struktural, serta peluang

advokasi kebijakan berbasis temuan lapangan.

Pada bulan terakhir, mahasiswa menyusun laporan akhir kegiatan yang bukan hanya berisi capaian numerik seperti peningkatan nilai siswa atau jumlah kegiatan, tetapi juga rekomendasi kebijakan berbasis konteks lokal. Laporan ini disampaikan kepada kepala sekolah dan dinas pendidikan kabupaten sebagai bentuk advokasi berbasis bukti, yang diharapkan mampu memberi masukan untuk perbaikan program di masa mendatang.

Dengan metode yang holistik dan reflektif ini, kegiatan pengabdian diharapkan tidak berhenti pada penguatan kapasitas di tingkat mikro (sekolah dan siswa), tetapi juga mampu membangun kesadaran kritis di tingkat makro mengenai pentingnya pendidikan yang adil, partisipatif, dan kontekstual. Model ini juga dapat direplikasi oleh mahasiswa lain yang mengikuti program serupa, sehingga peran Kampus Mengajar dapat ditingkatkan dari sekadar kegiatan administratif menjadi ruang pendidikan politik dan transformasi sosial yang sejati.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pengabdian melalui program Kampus Mengajar menunjukkan berbagai temuan lapangan yang memperlihatkan kompleksitas persoalan pendidikan dasar di daerah pinggiran. Secara umum, terdapat dua kategori utama hasil: pertama, hasil intervensi teknis dalam proses pembelajaran di kelas dan pendampingan literasi digital; kedua, hasil refleksi dan analisis struktural terhadap praktik kebijakan pendidikan yang berjalan

di tingkat mikro (sekolah) serta makro (negara).

Dari segi intervensi teknis, pelaksanaan program literasi dan numerasi mengalami kemajuan terbatas. Dalam 3 bulan pelaksanaan kegiatan, terdapat peningkatan kemampuan membaca dan berhitung pada sebagian siswa kelas rendah (kelas 1–3), ditunjukkan dengan peningkatan skor evaluasi awal dan akhir sebesar rata-rata 15–20%. Namun, peningkatan ini sangat tergantung pada dukungan guru kelas, ketersediaan media belajar, serta keberadaan mahasiswa itu sendiri. Dalam beberapa kelas yang tidak memiliki guru tetap, mahasiswa menjadi satu-satunya fasilitator pembelajaran, mengindikasikan betapa rapuhnya sistem ketenagakerjaan di sekolah-sekolah daerah.

Penerapan literasi digital menunjukkan hambatan yang lebih besar (Haris, Kontu, et al., 2024). Upaya memperkenalkan media pembelajaran berbasis teknologi sering terhenti karena terbatasnya infrastruktur sekolah. Hanya satu ruang kelas yang memiliki perangkat proyektor, dan bahkan itu hanya berfungsi pada waktu-waktu tertentu karena pemadaman listrik bergilir. Koneksi internet sangat tidak stabil, memaksa mahasiswa untuk mengandalkan kuota pribadi untuk mengakses materi daring. Sementara itu, siswa sebagian besar tidak memiliki perangkat digital di rumah, yang menyebabkan ketimpangan akses terhadap sumber belajar berbasis teknologi semakin dalam.

Dari sini terlihat bahwa wacana tentang transformasi digital dalam pendidikan yang digaungkan oleh pemerintah pusat tidak memiliki

landasan material yang cukup kuat di wilayah-wilayah marginal (Zein & Septiani, 2024). Konsep "literasi digital" menjadi wacana kosong ketika infrastruktur tidak tersedia. Hal ini menunjukkan adanya politik literasi yang timpang: pihak-pihak yang memiliki akses terhadap sumber daya digital akan terus melaju, sementara kelompok rentan seperti siswa di daerah pinggiran terus tertinggal. Keadaan ini memperlihatkan bagaimana literasi digital bukan hanya masalah teknis, tetapi juga politik distribusi dan akses.

Hasil wawancara dengan para guru memperlihatkan ambivalensi terhadap program Kampus Mengajar. Di satu sisi, guru-guru merasa terbantu dengan kehadiran mahasiswa, terutama dalam mengelola kelas dan menyiapkan materi pembelajaran. Namun di sisi lain, mereka menyampaikan kritik terhadap kecenderungan pemerintah mengandalkan mahasiswa sebagai solusi jangka pendek atas masalah kronis seperti kekurangan guru dan beban administrasi yang berat. Dalam beberapa kasus, mahasiswa bahkan diminta mengerjakan tugas-tugas administratif yang seharusnya diemban oleh tenaga pendidik profesional. Hal ini menunjukkan bagaimana mahasiswa dalam program ini sering kali terjebak dalam logika utilitarianisme birokratis, alih-alih menjalankan fungsi edukatif murni.

Temuan lain yang krusial adalah lemahnya partisipasi komunitas sekolah dalam proses pengambilan keputusan. Dalam rapat-rapat sekolah yang sempat diikuti, suara orang tua dan komite sekolah hampir tidak terdengar.

Kebijakan terkait pengembangan program belajar, alokasi dana BOS, atau rencana penggunaan teknologi digital sepenuhnya dikendalikan oleh kepala sekolah dan guru senior, tanpa proses konsultasi yang terbuka. Hal ini memperlihatkan masih kuatnya budaya birokrasi sentralistik di tingkat sekolah, yang mencerminkan pola kebijakan pendidikan nasional yang tidak sepenuhnya partisipatif.

Dari sisi refleksi mahasiswa, ditemukan beragam respons yang menarik. Beberapa mahasiswa mengalami kejutan budaya (*culture shock*) ketika menyadari kondisi nyata pendidikan di daerah jauh dari bayangan mereka sebelumnya. Keterbatasan fasilitas, rendahnya minat belajar siswa, serta kurangnya dukungan dari pemerintah daerah menjadi realitas yang membuat banyak mahasiswa mulai mempertanyakan efektivitas program Kampus Mengajar secara struktural. Di sinilah muncul kesadaran kritis bahwa peran mereka bukan hanya sebagai fasilitator belajar, tetapi juga sebagai pengamat sosial dan agen perubahan yang potensial.

Refleksi ini semakin menguat ketika mahasiswa mulai menyadari bahwa keberadaan mereka lebih banyak mengisi kekosongan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. Kampus Mengajar, meskipun dikemas sebagai program partisipatif, pada akhirnya memperlihatkan gejala privatisasi tanggung jawab negara terhadap pendidikan. Dalam istilah ekonomi politik pendidikan, ini merupakan bentuk dari neoliberalisasi pendidikan, di mana negara menarik diri dari tanggung jawab langsung dan mengandalkan aktor non-negara (mahasiswa,

relawan, LSM) untuk menjalankan fungsi-fungsi layanan publik.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dibaca bahwa Kampus Mengajar telah menjadi alat teknokrasi pendidikan yang efektif dalam mengisi kekosongan jangka pendek, tetapi tidak dirancang untuk melakukan transformasi struktural. Pendekatan kebijakan top-down, kurangnya pelibatan aktor lokal, dan minimnya keberlanjutan program menyebabkan intervensi pendidikan menjadi tidak berakar dan mudah hilang setelah program selesai. Bahkan, dalam beberapa kasus, kepala sekolah mengaku tidak mengetahui tindak lanjut apa yang akan dilakukan pemerintah setelah program mahasiswa selesai.

Di sisi lain, program ini memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengalami pembelajaran sosial-politik yang tidak tersedia di ruang kuliah. Ketika mahasiswa mulai menyusun jurnal reflektif dan mengadakan diskusi mingguan, muncul narasi-narasi kritis yang membongkar ilusi keberhasilan program. Mahasiswa mulai mempertanyakan logika kebijakan, posisi mereka dalam sistem, dan potensi advokasi kebijakan yang bisa dilakukan. Inilah titik temu antara pengabdian dan pendidikan politik. Kampus Mengajar, jika dikemas dengan pendekatan kritis, dapat menjadi laboratorium kesadaran kelas dan demokrasi partisipatif.

Hasil lainnya adalah penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis konteks lokal. Berdasarkan data lapangan, mahasiswa menyusun dokumen advokasi yang memuat kebutuhan infrastruktur digital, peningkatan jumlah guru tetap, pelatihan literasi digital berbasis konteks lokal, serta

penguatan mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan sekolah. Dokumen ini diserahkan kepada dinas pendidikan kabupaten dengan harapan dapat menjadi dasar perbaikan program ke depan. Walaupun kecil, upaya ini memperlihatkan potensi mahasiswa sebagai agen pengubah kebijakan (*policy actors*) berbasis pengalaman lapangan.

Hasil pengabdian ini sekaligus membuka ruang diskusi mengenai bagaimana pengabdian masyarakat dalam pendidikan tinggi harus dirumuskan. Selama ini, banyak program pengabdian yang bersifat teknis dan melulu berorientasi pada hasil cepat. Padahal, dalam konteks sosial-politik yang kompleks, pengabdian seharusnya menjadi ruang dialektis antara teori dan praktik, antara idealisme akademik dan kenyataan struktural. Model pengabdian partisipatoris-reflektif seperti dalam kegiatan ini menawarkan alternatif pendekatan yang lebih berorientasi pada keadilan sosial.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa meskipun terdapat dampak positif di tingkat mikro, terutama dalam membantu siswa dan guru dalam proses belajar-mengajar, terdapat persoalan mendalam yang harus dibahas pada level makro. Ketimpangan akses, rendahnya partisipasi masyarakat, logika neoliberal dalam kebijakan pendidikan, serta lemahnya keberlanjutan program menunjukkan bahwa intervensi semacam ini belum menjawab akar masalah. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi ulang terhadap desain dan orientasi program-program sejenis di masa mendatang.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui program Kampus Mengajar ini mengungkapkan bahwa meskipun terdapat dampak positif di level mikro, seperti peningkatan kemampuan literasi siswa dan pendampingan teknis terhadap guru, terdapat realitas struktural yang jauh lebih kompleks. Keterbatasan infrastruktur digital, kekurangan guru tetap, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sekolah, serta ketergantungan terhadap tenaga mahasiswa menunjukkan lemahnya fondasi sistem pendidikan di daerah marginal. Dalam konteks ekonomi politik, program ini tampak sebagai solusi jangka pendek yang justru menyamakan kewajiban negara dalam menyediakan pendidikan yang adil dan merata.

Namun demikian, pengalaman mahasiswa di lapangan membuka ruang bagi pembentukan kesadaran kritis, yang menjadikan pengabdian ini sebagai wahana pembelajaran sosial dan politik. Melalui refleksi dan analisis partisipatoris, mahasiswa tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga aktor kebijakan yang mampu menyuarakan rekomendasi berbasis bukti lapangan. Model pengabdian seperti ini perlu didorong sebagai pendekatan alternatif yang lebih bermakna, kritis, dan transformatif dalam rangka merekonstruksi peran pendidikan tinggi dalam menyikapi persoalan struktural di masyarakat.

Saran

Diperlukan perumusan ulang desain program Kampus Mengajar agar lebih partisipatif, kontekstual,

dan berkelanjutan. Negara harus kembali mengambil peran utama dalam memastikan pemenuhan hak atas pendidikan dasar, bukan hanya mengandalkan partisipasi mahasiswa sebagai solusi sementara. Selain itu, mahasiswa perlu didorong untuk menjalankan peran reflektif dan advokatif agar pengabdian yang dilakukan tidak sekadar menjadi kerja sosial teknis, tetapi menjadi alat transformasi sosial dan demokrasi pendidikan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Haris, U., Adam, A., Saputro, E., & Mardiana, W. O. (2025). *Memahami Teori Politik: Sebuah Pengantar*. Literasi Indonesia.
- Haris, U., Enala, S., & Syahrudin, S. (2024). Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi: Sosialisasi Literasi Digital untuk Kesejahteraan Masyarakat. *JPI Jurnal Pengabdian Dan Inovasi*, 1(02), 49–55.
- Haris, U., & Kontu, F. (2024). Sosialisasi Penggunaan Perangkat Teknologi Dalam Membantu Kinerja Pemerintah Di Kampung Matara. *Kreativasi: Journal of Community Empowerment*, 3(1), 1–10.
- Haris, U., Kontu, F., & Syahrudin, S. (2024). Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung dalam Pengelolaan Dana Desa di Kampung Wasur Distrik Merauke melalui Pendidikan dan Pelatihan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 6(3), 34–41.
- Haris, U., & Oja, H. (2024). Ekonomi Politik dan Pembangunan Sosial di Kota Merauke: Analisis Peraturan Bupati Merauke Nomor 142 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 13(2), 482–491.
- Haris, U., Oja, H., & Tambajong, H. (2025). Analisis Dilema Kebijakan Fiskal Indonesia dalam Kerangka Teori Keynesian. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 14(1), 123–132. <https://doi.org/10.35724/sjias.v14i1.6933>
- Setyawan, F., Fauzi, I., Fatwa, B., Abdussalam, H., & Jannah, N. (2021). *Analisis Kebijakan Pendidikan Full Day School di Indonesia*. 30, 3.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi Metode R&D*. Alfabeta.
- Syahrudin, S., Haris, U., & Jalal, N. (2025). *Buku Ajar Kebijakan Publik dan Aplikasi*. UNY Press.
- Zein, H., & Septiani, S. (2024). *Digitalisasi Pemerintahan Daerah*. Sada Kurnia Pustaka.